

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MUSI SATU KECAMATAN
KALONGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**RUTLI ONNOA
JOORIE M. RURU
VERY Y. LONDA**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Sam Ratulangi

Abstract

Development planning in Musi One Village, Kalongan Subdistrict, Talaud Islands Regency, there are several indications of problems encountered in the research. The research method used in this research is qualitative research using an interactive analysis model. Data obtained from interviews, observation, and documentation. Data analysis was performed through data reduction; presentation of Data; and Conclusions. Based on the results of research conducted development planning in Musi One Village has been going well, especially Economic Development Planning, Environmental Development Planning and Physical Development are running quite well, or have not met the criteria of the previously planned objectives. For this reason, the authors recommend that the Musi One Village government take a persuasive approach with the community regarding the importance of cooperation in environmental cleaning, the Musi One Village Government must collaborate with the sub-district government to obtain health workers (mantri) or the village government can take immediate action by taking part of the village fund to fund the financing of health workers (mantri) at the Musi One Village Polindes for the benefit of the general public. And also regarding road infrastructure development, it is recommended that the Musi One Village Government be able to place road proposals in the super-priority order proposed at the village, sub-district and district musreimbang every year.

Keywords: Planning; Village Development

Abstrak

Perencanaan pembangunan di desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat beberapa indikasi masalah yang di temui dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui Reduksi Data; Penyajian Data; dan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perencanaan pembangunan di Desa Musi Satu sudah berjalan dengan baik khususnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, sedangkan perencanaan Pembangunan Kelembagaan, Perencanaan Pembangunan Lingkungan dan Pembangunan Fisik berjalan dengan cukup baik, atau belum memenuhi kriteria dari tujuan yang sudah di rencanakan sebelumnya. Untuk itu penulis merekomendasikan kepada pemerintah Desa Musi Satu untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan masyarakat perihal pentingnya kerja sama dalam pembersihan lingkungan, Pemerintah Desa Musi Satu harus melakukan kerja sama dengan pemerintah kecamatan untuk memperoleh tenaga kesehatan (mantri) atau Pemerintah Desa bisa langsung mengambil tindakan dengan pengambilan sebagian Dana Desa untuk mendanai pembiayaan tenaga kesehatan (Mantri) di Polindes Desa Musi Satu demi kepentingan masyarakat umum. Dan juga mengenai pembangunan infrastruktur jalan disarankan Pemerintah Desa Musi Satu dapat menempatkan usulan jalan pada urutan superprioritas yang diusulkan pada musreimbang desa, kecamatan dan kabupaten setiap tahun.

Kata Kunci: Perencanaan; Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Dari waktu ke waktu pemerintah Indonesia sedang terpacu untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Ketentuan umum UU No. 25 Tahun 2004 pasal 1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sedangkan Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani maupun jasmani.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan

pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan konsep pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotongroyong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya.

Kesuksesan pembangunan kabupaten atau kota sangat bergantung kemampuan birokrasi pemerintah dalam menggerakkan pembangunan di tingkat desa, karena Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya di karenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pembuatan suatu perencanaan pembangunan harus mengikut sertakan secara aktif setiap warga negara atau kelompok masyarakat baik dalam pengambilan keputusan, perumusan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang tujuannya untuk mengatur kehidupan bersama. Pembangunan desa akan berjalan optimal apabila program yang di buat bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berupa pendapatan, peningkatan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan

Tujuan perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Permasalahan pembangunan yang muncul di daerah pedesaan, dapat di tanggulangi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya yaitu perbaikan infrastruktur yang ada di daerah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mulai memperkenalkan program pembangunan yang melibatkan masyarakat dimulai dari tahapan pengusulan kegiatan atau proyek sampai dengan pemeliharannya. pembangunan berbagai infrastruktur pedesaan mulai dari jalan pedesaan, irigasi pedesaan, air bersih pedesaan, infrastruktur sanitasi pedesaan dan pembangunan lainnya.

Desa yang mengalami permasalahan pembangunan adalah Desa Musi Satu. Desa Musi Satu merupakan desa yang berada di Kecamatan Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Keterbatasan yang dialami oleh masyarakat desa musu satu ini di perparah dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih minim yakni, Pembangunan Infrastruktur yang termasuk kedalam pembangunan Fisik dan sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan Infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang.

Infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Sebaliknya keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti halnya jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sarana pelistrikan, sarana irigasi dan sarana transportasi juga sering dikaitkan sebagai pemicu

perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu daerah. Dengan mudah kita dapat menilai perbedaan kesejahteraan suatu daerah hanya dengan melihat dari kesenjangan infrastruktur semakin penting untuk diperhatikan. Hal ini didasarkan pada manfaat dari keberadaan infrastruktur yang terjadi didalamnya. Terkait dengan hal tersebut diatas, untuk itu kedepannya, percepatan pembangunan infrastruktur semakin penting untuk lebih diperhatikan. Hal ini didasarkan pada manfaat dari keberadaan infrastruktur seperti halnya jalan yang dapat berperan sebagai sarana pembuka keterisolasian suatu wilayah dari dunia luar sehingga dengan adanya infrastruktur ini diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Dewasa ini pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk lebih diperhatikan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan pada umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya. Hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, Bab I Pasal I ayat 10 dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa melibatkan BPD dan unsur masyarakat. Dimana bidang-bidang dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tersebut merupakan pedoman dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai

perwujudan visi dan misi dari Kepala Desa (Kades) yang terpilih dan tentunya pada proses penyusunannya harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sedangkan pada umumnya pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat kemudian menganggap pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Dengan kondisi yang seperti ini menyebabkan infrastruktur yang telah terbangun tadi fungsinya menjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dan tidak tepat waktu yang pada akhirnya infrastruktur yang telah terbangun tadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Melihat masih minimnya infrastruktur jalan yang ada di Desa Musi Satu membuat keberadaannya harus untuk dilakukan pembangunan infrastruktur seperti halnya jalan pedesaan yang baik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat yang mana keberadaannya harus disediakan oleh pemerintah. Sarana jalan di wilayah pedesaan dapat menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi masyarakat desa karena dengan adanya sarana jalan yang baik hal ini merupakan salah satu upaya untuk membuka keterisolan akses wilayah di pedesaan dari pusat-pusat produksi dan tempat-tempat distribusi atau pemasaran barang dan jasa yang ada pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Ketika sarana jalannya baik, hal ini juga akan menjadi suatu hal positif untuk pemerintah desa, karena lewat pembangunan yang baik maka pemerintah akan dipandang telah memperhatikan apa yang menjadi kekurangan desa dalam hal ini pembangunan jalan.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka pemerintah harus menggunakan Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Desa yakni salah satunya yaitu, Top-down planning (perencanaan dari atas ke bawah) di mana perencanaan dari atas ke bawah merupakan sebuah proses perencanaan klasik yang berisi penyusunan rencana strategis di atasnya (Kabupaten/kota, Provinsi, dan Pusat) dan komitmen politik yang direncanakan oleh pemerintah di atasnya (Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam konteks:

- a. Rencana Pembangunan Desa harus sinergi dengan Arah dan Kebijakan di Tingkat Pusat maupun Daerah; dan
- b. Rencana Pembangunan Desa merupakan Bentuk Sinergi dan Komitmen pemerintah terhadap Tujuan Pembangunan Global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development*, Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Pemenuhan Air Bersih, Sanitasi, dan Infrastruktur Dasar.

Secara umum pemerintah Desa memiliki Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang bertugas membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan seperti secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat, menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan desa akan semakin menantang dimasa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, terbelakang dan miskin, meskipun banyak

pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan Indonesia. Jika tidak maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Pembangunan masyarakat desa pada umumnya bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan), dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Salah satu misi yang ada dalam Undangundang No 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional berbagai kutub perencanaan yang ada, yaitu perencanaan teknokratis, perencanaan politis, perencanaan partisipatif. Muara aktif dari upaya tersebut adalah terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Beberapa komponen penting dari aspek perencanaan pembangunan antara lain mencakup: (1) perencanaan pembangunan ekonomi, menitik beratkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensial, meningkatkan produktifitas pertanian dan non pertanian, dapat memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-sektor pelayanan publik, (2) perencanaan pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat, (3) perencanaan pembangunan kelembagaan, yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki

tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya, penguatan lembaga, (4) pembangunan fisik dan sosial, di antaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pembangunan dan bermaksud mengangkat judul tentang “ Perencanaan Pembangunan Desa Musi Satu Kec.Kalongan Kab.Kepl.Talud”.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talud. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi aparatur desa dan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan pedesaan.

Penelitian ini didukung oleh beberapa referensi literatur penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Usman Budiarto, Dengo Salmin, Londa Very (2016) Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini berangkat dari indikasi BPD lebih cenderung mengutamakan kepentingan dan keinginan pemerintah desa/kepala desa dari pada memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan dengan efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan

atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa fungsi BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara pada umumnya sudah dilaksanakan cukup baik dilihat dari beberapa dimensi, yaitu; (1) fungsi dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des); (2) fungsi dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan

Tahunan Desa (RKP-Des); (3) fungsi dalam menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa pada pembangunan desa di desa; (5) fungsi mengawasi pelaksanaan RPJMD dan RKP; (6) Fungsi didalam membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan pembangunan di desa; (7) kegiatan atau tindakan yang dilakukan di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKP; (8) pelaksanaan hak meminta keterangan tentang pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah Desa; (9) pelaksanaan hak menyatakan pendapat atas pelaksanaan pembangunan desa; (10) fungsi melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan desa di desa anda; (11) fungsi melakukan tindakan korektif (mengoreksi) terhadap pelaksanaan suatu program pembangunan desa di desa yang dianggap kurang tepat atau ada ketidaksesuaian atau penyimpangan atau penyelewengan; (12) fungsi menanggapi dan menindaklanjuti laporan dan berbagai keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa; (13) fungsi membahas laporan ataupun berbagai keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa pada musyawarah desa; dan (14) fungsi mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa belum secara

maksimal dilaksanakan dikecamatan Galela, sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu BPD harus beruaha dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional dan objektif tanpa pengaruh atau intervensi dari kepala desa, pengurus BPD harus merupakan orang-orang yang punya kemampuan baik pada aspek pengetahuan/pendidikan, pengalaman, sikap, mental, serta punya komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan di desa, BPD harus didukung oleh masyarakat setempat didalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Hasil penelitian tersebut dapat memberikan implikasi bahwa pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan hal penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa merupakan hal penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa dan untuk menghindari atau mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu fungsi pengawasan BPD tersebut harus dapat dilaksanakan dengan efektif oleh semua BPD yang ada.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu ini sama-sama mengkaji tentang pembangunan desa, memiliki persamaan dalam jenis penelitian peneliti yang memakai metode penelitian kualitatif.

Moniung Mariana Tiara, Mandey Jantje, Londa Verry (2015) Manajemen Keuangan Desa Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang manajemen keuangan desa sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai gambaran untuk peneliti. Dimana manajemen/pengelolaan keuangan desa meliputi mengelola dan memobilisasi sumber daya dari sisi pendapatan dan pembelanjaan desa yang di dasarkan pada potensi dan kebutuhannya.

Ada beberapa aspek yang bisa diperiksa bersama berkaitan dengan bagaimana keuangan desa dikelola saat ini. Pertama, mengkaji dari sisi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dan implikasinya terhadap praktik pengelolaan keuangan desa, kedua, bagaimana dinamika praktik pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (Desa Kanonang Empat), ketiga, permasalahan apa saja yang dihadapi berkaitan dengan praktik manajemen/pengelolaan keuangan desa saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kesimpulan yaitu:

1. keberhasilan pembangunan desa cukup baik dilihat dari hasil gotong royong antara masyarakat dan pemerintah desa tersebut.
2. manajemen keuangan desa yang cukup baik karena dengan batuan dari masyarakat yang selalu ingin mensukseskan pembangunan yang ada di desa.
3. proses pembangunan merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Mereka selalu bergerak secara bersamasama sebagai satu kesatuan. Dan untuk memadukan gerak langkah tersebut diperlukan suatu koordinasi yang mantap.
4. pemerintah dilibatkan langsung untuk mengatur sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang keberhasilan pembangunan desa.

Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana tersebut. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Wenda Neranus, Pangkey Masye, Londa Very (2015) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Milinggame Kecamatan Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya

Propinsi Papua. Penelitian ini berangkat dari indikasi rendahnya partisipasi warga desa/kelurahan kabupaten Milinggame Tiomneri dalam proses pembangunan pedesaan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Pertanyaan/masalah penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tingkat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di desa mereka mengenai program pembangunan; (2) bagaimana tingkat partisipasi masyarakat perdesaan/desa mlinggame dalam proses implementasi dalam program pembangunan desa mereka. Fokus penelitian ini kemudian menjadi beberapa sub-variabel yaitu: (1) partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan program pembangunan desa; (2) partisipasi masyarakat dalam proses implementasi program pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Milinggame Kecamatan Tiomeri Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua, yaitu sebagai berikut:

1. partisipasi masyarakat desa/kampung Milinggame di dalam proses pengambilan keputusan program pembangunan di desa/kampung umumnya masih rendah dilihat dari indikator yang digunakan. Salah satunya yaitu, keikutsertaan dalam acara pertemuan atau rapat-rapat di desa yang membicarakan penetapan rencana program-program pembangunan di desa yang diadakan oleh pemerintah desa.
2. Partisipasi masyarakat desa/kampung milinggame dalam proses implementasi/pelaksanaan program-program pembangunan desa/kampung juga umumnya masih rendah dilihat dari beberapa indikator yang digunakan, salah satunya yaitu keikutsertaan dalam memberikan sumbangan pemikiran (saran/pendapat) untuk pelaksanaan suatu program pembangunan di desa yang sudah ditetapkan/diputuskan bersama.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu ciri utama dari pembangunan desa. Sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pemberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Dalam rangka pembangunan desa partisipasi masyarakat merupakan keluaran dan juga merupakan masukan yang mutlak diperlukan bagi pembangunan desa.

J.B Kritiadi (1995:12) menyebutkan bahwa perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan dimuka hal-hal yang akan di kerjakan kemudian. Dengan kata lain *planning* adalah sekarang untuk tindakan yang akan datang. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Jadi perencanaan adalah hal-hal yang dilakukan untuk menentukan hal-hal yang akan dikerjakan dikemudian hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdsarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur,

dan sejahtera. Sjafrizal (2015:24). Jadi perencanaan adalah cara untuk mencapai tujuan yang lebih tepat sasaran, terarah dengan kebutuhan utama, dan efisien dengan kondisi suatu daerah/pedesaan.

Bintoro (1983:2) menyebutkan dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistimatis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolak didalam pelaksanaannya. Jadi perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan nantinya tidak menimbulkan permasalahan, pembangunan juga bisa terlaksanan secara teratur dan terorganisir.

Menurut Sjafrizal (2015:25) bahwa komponen utama dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah:

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan;
2. Mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan;
3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Mempunyai suatu sasaran yang jelas sesuai dengan kegiatan masyarakat.

Beberapa komponen penting dari aspek perencanaan pembangunan antara lain mencakup: (1) perencanaan pembangunan ekonomi, menitik beratkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensial, meningkatkan produktifitas pertanian dan non pertanian, dapat memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-sektor pelayanan publik, (2) perencanaan pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah

lingkungan yang ramah dan bersahabat, (3) perencanaan pembangunan kelembagaan, yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya, penguatan lembaga, (4) pembangunan fisik dan sosial, di antaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.

pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif diperlukan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga tujuan dari penelitian ini bisa tercapai, karena jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam maleong, 2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Fokus penelitian menggunakan teori dari Sjafrizal (2015:25). Dalam penelitian ini ada 10 (sepuluh) orang yang menjadi informan, yaitu: Kepala Desa Musi Satu 1 orang, Pengurus BPD Desa Musi Satu 5

orang, dan Masyarakat Desa Musi Satu 4 orang. Dengan menggunakan Teknik Analisis Data yang terdiri dari

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

Menurut Benny dan Huges (dalam Sedarmayanti dan Hidayat, 2011:80), wawancara merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memahami sesuatu keinginan atau kebutuhan. Wawancara merupakan interaksi antar manusia. Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan informan sesuai dengan panduan wawancara yang hasilnya dicatat dan sebagian di rekam. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah handphone, yang dilengkapi pula dengan catatan-catatan kecil peneliti. Wawancara dilakukan bersama dengan observasi.

2. Observasi

Menurut Serdamayanti dan Hidayat (2011:75), Obsevasi yaitu pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Obsevasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung. Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks dimana kegiatan ini terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-menyerurat,

peraturan daerah, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari: Reduksi Data; Penyajian Data; dan Kesimpulan.

Penelitian ini menekankan pada 4 aspek Perencanaan Pembangunan dari Sjafrizal (2015:25) :

1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Perencanaan Pembangunan Lingkungan
3. Perencanaan Pembangunan Kelembagaan
4. Pembangunan Fisik dan Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan di kejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuantujuan itu dapat tercapai. Sebagian orang berpikir tentang perencanaan dalam arti yang lebih sempit dari memutuskan jalan yang akan diambil untuk kegiatan-kegiatan. Perencanaan sebagai suatu kegiatan terorganisir terhadap persoalan-persoalan yang akan datang dan menguraikannya secara lambat laun membentuk pola sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Adapun pendapat dari ahli George R. Terry dan Leslie W. Rue (2010:44).Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi dan tidak atas emosi dan keinginan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Seperti perencanaan pembangunan yang terjadi di desa musi satu dimana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara musyawarah di mulai dari penggalian gagasan lewat musyawarah dusun, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa.

Disana di lakukan musyawarah mufakat jika ada perbedaan pendapat pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.

Dalam pembangunan infrastruktur melihat kebutuhan masyarakat/desa yang diprioritaskan misalnya jalan. Jalan merupakan prasarana yang sangat vital untuk menunjang kelancaran sarana transportasi sekaligus sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta sebagai jalur arteri bagi transportasi lokal, karena itu sudah selayaknya pembangunan sarana jalan mendapat perhatian yang serius, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses dapat diwujudkan. Sebagai fungsinya kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan antar kampung atau antar kecamatan.

Pembangunan infrastruktur jalan yang berada antar desa dengan desa maupun desa dengan kota yang merupakan sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi, terutama jaringan jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat yang berada di Desa Musi Satu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi, perencanaan pembangunan desa musi satu sudah baik walaupun ada beberapa yang belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan pemerintah desa musi satu.

1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perencanaan ekonomi adalah upayaupaya yang dilakukan pemerintah untuk mengkoordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkatan dan laju pertumbuhan ekonomi, demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah disepakati sebelumnya.

Perencanaan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang.

Dari hasil penelitian bahwa perencanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah desa musu satu sudah teratur dengan baik dimana pemerintah selalu berupaya dalam peningkatan pendapatan masyarakat dibidang ekonomi melalui musyawarah dari tingkat dusun untuk penggalan gagasan (diawal periode) dalam penyusunan RPJM-Des yang didalamnya memuat usulan dari masyarakat merupakan bagian bidang pemberdayaan. Perencanaan pembangunan peningkatan produktifitas pertanian dan Non pertanian dalam musyawarah terjalin juga kerja sama antara BPD dan Pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat, adat dan agama. Pemerintah desa musu satu memberikan bantuan kepada sekelompok usaha berdasar jenis usaha dari masing-masing masyarakat.

Merujuk dari penelitian terdahulu mengenai fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa sudah berjalan dengan baik terbukti dilihat dari hasil program kerja Tahunan Pemerintah Desa Musu Satu. Seperti yang diketahui bahwa Pengawasan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa perlu dilakukan dengan efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan

korektif atau perbaikan. Dan di Desa Musu Satu rencana pembangunan Ekonomi selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebetulnya oleh pemerintah dan masyarakat.

2. Perencanaan Pembangunan Lingkungan

Dalam Perencanaan pembangunan ekonomi terdapat juga pembangunan lingkungan merupakan pembangunan yang berjangka panjang untuk mengedepankan faktor lingkungan bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di desa musu satu pemerintah desa bersama tim 11 (penyusun RKP-Des) menekankan pada program pembangunan yang mengedepankan faktor lingkungan misalnya penanggulangan abrasi pantai dengan membangun Talud Penahan Ombak, sistem Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan pembangunan itu sudah terealisasi.

3. Perencanaan Pembangunan Kelembagaan

Dalam pembangunan desa ada juga perencanaan pembangunan kelembagaan yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, sampai dengan pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat didalamnya pasti program pembangunan tepat sasaran dimana perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Sjafrizal (2015:24).

Sebagaimana yang ditemukan peneliti di desa musu satu pemerintah selalu melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah mulai dari tingkat dusun sampai desa. Jika

mengalami perbedaan pendapat pemerintah mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat dengan cara pengambilan suara terbanyak.

4. Pembangunan Fisik dan Sosial

Pembangunan fisik dan sosial diantaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur adalah unsur yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran perkembangan dan pengembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat bahkan hasilnya pun kurang optimal. Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum.

Pentingnya infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan infrastruktur tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di desa musi satu pengembangan kualitas pendidikan sudah berjalan dengan baik, pembangunan fasilitas pelayanan sudah ada dan yang menjadi permasalahannya polindes yang ada di desa musi satu tidak memiliki tenaga kesehatan (mantri), dan pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan yang butuh perhatian dari pemerintah provinsi dimana jalan penghubung antar desa, desa antar kecamatan, dan desa antar kota merupakan anggaran dari provinsi. Jalan yang

merupakan anggaran dari dana desa sudah terealisasi dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi di desa musi satu sudah berjalan dengan baik, terjalin kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat desa musi satu.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan hampir berjalan dengan sempurna tanpa kendala dari pemerintah. Hanya saja ada beberapa masyarakat tidak menjalankan program pemerintah yang telah disepakati sebelumnya yakni kerja bakti pembersihan lingkungan desa musi satu.
3. Perencanaan pembangunan kelembagaan sudah terlaksana dengan baik, dalam perencanaan pembangunan di desa musi satu pemerintah selalu melibatkan masyarakat dan di dalam pengambilan keputusan selalu memakai sistem musyawarah mufakat.
4. Pembangunan fisik dan sosial dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi kualitas pelayanan kesehatan (mantri) dan pembangunan jalan berupa infrastruktur jalan belum berjalan dengan baik.

Saran

Dari hasil kesimpulan yang ada maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa musi satu disarankan dapat melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan kepada masyarakat untuk melakukan kerja bakti pembersihan lingkungan,

2. Dalam pendanaan membiayai tenaga kesehatan (mantri) disarankan pemerintah desa musi satu dapat mengambil kebijakan dengan mengambil sebagian dana desa untuk dilimpahkan pada tenaga kesehatan, disamping menunggu hasil kerja sama dengan pemerintah kecamatan.
3. Untuk pembangunan jalan di desa musi satu di sarankan pemerintah desa dapat menempatkan usulan jalan pada urutan super prioritas yang di usulkan pada musrembang desa, kecamatan dan kabupaten setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro, 1983, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunug Agung.
- Bodgan dan Taylor, 2000, Dalam Maleong, *Metode Penelitian*, Carbondale: Southern Illiona University Press.
- George, R.T. dan Leslie, W.R., 2010, *DasarDasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kristiasdi, J.B., 1995, *DR Perencanaan*, LAN RI, JAKARTA.
- Moniung, M., T., Mandey, J., & Londa, V. 2015. Manajemen Keuangan Desa Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat. *JAP Unsrat*, 4(32): 1-7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Sedarmayanti dan Hidayat, 2011, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Sjafrizal, 2015, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Raja Grafito persada.
- Usman, B., Dengo, S., & Londa, V. 2016. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten

Halmahera Utara. *JAP Unsrat*, 3(41): 1-9.

- Wenda, N., Pangkey, M., & Londa, V. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Milinggame Kecamatan Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua. *JAP Unsrat*, 4(32): 1-8.

Sumber-Sumber Lain :

- Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 ayat 23 tentang Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.